

02 GOVERNMENTTODAY
Pro-kontra Video Presiden Prabowo Muncul di Bioskop04 NUSANTARA
Terpapar Radioaktif, RI Kembalikan 14 Kontainer asal Filipina10 LISTSTYLE
Pilihan Parfum yang Buat Penampilan Dewasa

PRESIDEN BELUM KIRIM SURPRES PERGANTIAN KAPOLRI KE DPR

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian menguat. Termasuk diantaranya adalah meminta supaya Presiden mengganti Kapolri yang saat ini dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan reformasi Polri itu datang dari berbagai pihak, di antara dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta; serta LSM dan akademisi yang mendukung reformasi kepolisian secara fundamental. Adanya desakan reformasi Polri ini tak lepas dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Mulai dari kasus kematian pengemudi ojek daring (online), Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat kerusuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Kemudian terjadinya insiden kerusuhan akhir Agustus 2025 di beberapa daerah. Terkait dengan desakan reformasi Polri ini, sempat muncul info yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah mengirimkan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk pergantian Kapolri. Namun, pada Minggu (14/9/2025), Istana menepis rumor tersebut dan menyatakan bahwa Presiden belum mengirim surpres tersebut. Selain itu juga muncul dua nama yang dinilai sebagai calon Kapolri baru nanti.

BACA HAL 11...

000

Siapa itu GNB?

- Gerakan lintas tokoh agama & masyarakat sipil.
- Tujuan: Menyampaikan aspirasi reformasi Polri ke Presiden.
- Pertemuan: Istana Kepresidenan, 11 September 2025.

Tokoh yang Hadir

- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
- Romo Franz Magnis-Suseno SJ
- Prof. M. Quraish Shihab
- KH Ahmad Mustofa Bisri
- Karlina Rohima Supelli
- Pendeta Jacky Manuputty
- Pendeta Gomar Gultom
- Romo A. Setyo Wibowo SJ
- Erry Riyana Hardjapamekas
- Laode Moh. Syarif
- Makarim Wibisono
- Komaruddin Hidayat
- Slamet Rahardjo

Aspirasi GNB

- Evaluasi & Reformasi Polri (struktur, budaya, perilaku).
- Supremasi sipil di atas aparat.
- Stop kekerasan aparat.
- Bentuk tim/komisi reformasi.

Suara Kritis

ALISSA WAHID
Aktivis sosial, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid

"Harus ada pembenahan utuh agar tak ada ruang kekerasan aparat."

LUKMAN HAKIM SAIFULLAH
Mantan Menteri Agama RI

"Kita serahkan kepada Presiden untuk secepatnya menempuh langkah-langkah konstruktif."

AMINULLAH SIAGIAN
Ketua Umum PP GPA

"Reformasi Polri harus nyata, bukan sekadar wacana."



Presiden Prabowo saat menemui GNB di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

PRO-KONTRA VIDEO PRESIDEN PRABOWO MUNCUL DI BIOSKOP

Munculnya video yang menampilkan capaian pelbagai program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop Tanah air memicu berbagai tanggapan pro-kontra dari warganet, pengamat, hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Dalam rekaman video tersebut, Kepala Negara menyatakan selalu siap untuk meng-hapuskan kemiskinan di Indonesia. Prabowo, dalam video itu, juga meng-klaim ihwal berhasilnya program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dijalkannya sejak awal tahun ini.

Selain menampilkan sosok Prabowo, rekaman video ini merilis sejumlah data, misalnya capaian keberhasilan program MBG yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia.

Lalu, rekaman video Prabowo juga menyajikan data produksi total beras nasional yang mencapai 21.760.000 ton total hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah yang mencakup angka 225 ribu hektare, hingga keberhasilan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.

Video yang diputar sebelum film utama di bioskop, disertai pemberitahuan agar penonton tidak merekam layar selama video tersebut menjadi viral di media sosial (medsos) dan jadi pembicaraan publik.

Terkait dengan hal itu, Mensesneg, Prasetyo Hadi buka suara. Dia mengatakan langkah itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak melanggar aturan. Penggunaan media-media seperti bioskop dalam penyampaian pesan merupakan hal yang lumrah.

"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah," ujar Prasetyo, Minggu (14/9/2025), dilansir inews.

Ia menegaskan bahwa bioskop, seperti halnya ruang publik lainnya,



dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemerintah untuk menyampaikan capaian maupun program yang sedang berjalan, asalkan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mendesak agar pemerintah tak meneruskan penayangan video tersebut di ruang publik. "Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini," ujar Usman.

Sementara, berbagai tanggapan juga muncul dari netizen. Di mana sebagian dari mereka menyampaikan kritik akan adanya video tersebut. Menurut netizen, kalau kerja Presiden benar tidak perlu validasi dengan pencitraan pastinya tetap akan diapresiasi rakyat.

"Ngapain? kalo emg kerjanya bener rakyat juga bakal ngapresiasi sendiri, kagak usah 'maksa' & banyak pencitraan," begitu salah satu komentar dari kolom komentar akun @catatanfilm.

Kemudian, akun Instagram @mont** menyerukan ajakan untuk hadir 15 menit setelah jadwal penayangan film di bioskop.

Tujuannya, agar para penonton tak harus melihat tayangan tersebut yang diputar jelang ditampilkannya film utama.

"Nonton bioskop sekarang ada Pak Prabowo dan mas Gibrannya," tulis akun X @DianSandiUtama, Minggu(14/9/2025).

Beberapa netizen yang sedang menonton bioskop juga kaget saat hendak menonton film di panggung layar lebar tersebut.

"Tidak mau nonton bioskop karena ada film Prabowo dan mas Gibran," tulis akun X @kalakembara.

"Betuuulllll. Kemarin saya tonton, ada begitu. Cuma mau bilang, kalau memang bagus, gak perlu validasi," Tulis @fman_firmansyah

Kemudian, tanggapan juga disampaikan aku triccala. "Ya gpp sih, selama masih menjabat aja. Isinya program2 dia biar rakyat ingat dan kawal. Nanti kalau udah ganti presiden isi video program presiden baru juga gpp, siapapun presidennya asal pas masa kampanye nanti, ilang itu video".

Sementara itu, Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana respon dari warganet terhadap penayangan video pencapaian pemerintah di bioskop merupakan suatu yang wajar.



"Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,"

Prasetyo Hadi
Mensesneg RI

"Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah," kata Asep dilansir tempo, Minggu (14/9/2025).

Lebih lanjut Asep mengatakan bahwa intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda ke ruang publik seperti bioskop, sebetulnya juga bukan fenomena baru. Sebab, pada 2018 lalu, mantan Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa, yaitu dengan menayangkan iklan capaian pemerintahan jelang diputarnya film utama di bioskop.

"Ini jadi berbeda karena Prabowo tak memiliki cara pencitraan yang lebih kuat dari yang dilakukan Jokowi. Sehingga wajar memperoleh protes keras," ujar dia.

Terkait dengan itu, Asep menyarankan agar pemerintah tak serta merta melakukan propaganda di ruang publik. Alasannya, pencapaian program pemerintahan memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan, tak harus menyisipkan di bioskop.

"Prabowo harus meninjau ulang propaganda ini karena akan berhubungan dengan citranya ke depan. Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik," ucap Asep. (han,ist/lut)

KEBERSEIRINGAN RUU PERAMPASAN ASET DAN KUHAP CEGAH ABUSE OF POWER

Komisi III DPR RI menekankan keberseiringan antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setidaknya keberseiringan itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menekankan bahwa keseimbangan antara substansi RUU Perampasan Aset dan kesiapan aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Tanpa payung hukum acara yang jelas, menurutnya, pelaksanaan perampasan aset bisa berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Agar tidak terjadi abuse of power, maka pengaturannya harus tepat di KUHAP. KUHAP lah yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak ketika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulis Minggu (14/9/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi RUU Perampasan Aset sebenarnya telah tersebar di berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan sejumlah regulasi lainnya. "Pasal-pasal yang sudah ada itu nanti dirunut, disusun kembali, dan dijadikan satu dalam undang-undang perampasan aset, bersama dengan KUHAP yang

mengatur aparat penegaknya," imbuhnya.

Terkait mekanisme pembahasan, Hinca menuturkan bahwa DPR RI nantinya akan memutuskan apakah RUU Perampasan Aset dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atau di Komisi III DPR RI. "Seandainya diserahkan ke Komisi III oleh pimpinan DPR, kami siap juga," katanya.

Dia menambahkan, hal itu penting karena KUHAP akan menjadi landasan hukum acara bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan terkait perampasan aset.

"RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons oleh Presiden, bahkan diserahkan ke DPR. DPR tentu meresponsnya dengan cepat. Tetapi RUU Perampasan Aset ini harus berjalan paralel dengan RUU KUHAP," ujar Hinca.

Dia juga menekankan adanya restorative justice. Terlebih lagi, lanjutnya, konsep dari restorative justice lahir dari kearifan lokal bangsa Indonesia, bukan gagasan impor dari penjajah Belanda. "Restorative justice itu sebenarnya sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia. Sebelum Belanda datang membawa KUHP kita, tidak ada kebiasaan saling memenjarakan. Semua persoalan diselesaikan dengan salaman," ungkap Hinca.

Hinca mencontohkan kisah-kisah klasik Nusantara, seperti cerita Hang Tuah dan Hang Jebat di Tanah Melayu, yang menggambarkan penyelesaian masalah tanpa harus melalui pengadilan. Menurutnya, masuknya hukum pidana kolonial Belanda sejak Staatsblad 1915 No. 732 dan berlaku pada tahun 1918 membuat budaya penyelesaian damai terpinggirkan. "Karena dia penjajah, kita dijajah. Maka melawan penjajah, masuk penjara," ujarnya.

Hinca menekankan bahwa UU KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 merupakan terobosan besar karena dibangun atas dasar demokrasi dan kearifan lokal bangsa. Oleh sebab itu, KUHAP yang menjadi hukum acara harus mampu



Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan.

mengakomodasi prinsip restorative justice secara menyeluruh.

"Selama ini aturan soal restorative justice terpisah-pisah di berbagai lembaga, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Mahkamah Agung. Ke depan tidak boleh lagi ada aturan yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus masuk dalam KUHAP agar berlaku untuk kita semua," tegasnya.

Dia juga mengapresiasi berbagai masukan dari aparat penegak hukum termasuk di Jambi. "Seluruh unsur tersebut sebelumnya telah menerima draf RUU KUHAP untuk dipelajari dan kemudian menyampaikan catatan serta usulan perbaikan," jelas Hinca.

Hinca menilai sejumlah masukan sangat konstruktif, salah satunya dari Pengadilan Tinggi Jambi mengenai pentingnya memasukkan konsep amicus curiae atau Sahabat Pengadilan dalam pembahasan RUU KUHAP. Menurutnya, konsep ini sudah dipraktikkan di lapangan, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat.

"Kalau ini masuk dalam pembahasan RUU KUHAP, maka Sahabat Pengadilan yang datang dari masyarakat akan memberikan nilai tambah. Mereka bisa menyampaikan pandangan, fakta, atau hal-hal yang mungkin tidak didapatkan penyidik, penuntut, maupun hakim. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus menjemput ide, gagasan, dan pikiran dari para penegak hukum maupun masyarakat, sehingga revisi RUU KUHAP dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa dua Rancangan Undang-Undang ini menjadi perhatian dan komitmen Komisi III dan berharap dua RUU ini tahun ini bisa tuntas.

Sudding menjelaskan bahwa RUU KUHAP akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan praktek perampasan aset nantinya. Oleh karena itu ia menekankan bahwa akan lebih baik bila RUU KUHAP terlebih dulu dirampungkan

kemudian baru membahas RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI memberikan atensi terhadap RUU Perampasan Aset. RUU itu pun sudah dimasukkan sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) tahun 2025 dan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

"Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Yaitu, satu RUU tentang Perampasan Aset, dua RUU Tentang Kamar Dagang Industri, tiga RUU Tentang Kawasan Industri. Jadi RUU Perampasan Aset tidak ada lagi di Pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025," ujar Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (09/09/2025). (rls/lut)



"Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Agar tidak terjadi abuse of power, maka pengaturannya harus tepat di KUHAP. KUHAP lah yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak ketika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya,"

Hinca Panjaitan
Anggota Komisi III DPR RI,

TIMELINE RUU PERAMPASAN ASET & KUHAP:

- **09 Sept 2025**
RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025 (inisiatif DPR).
- **14 Sept 2025**
Komisi III (Hinca & Sudding) tekankan:
- Harus sejalan dengan RUU KUHAP.
- KUHAP = payung hukum cegah abuse of power.
- Dorong restorative justice & konsep Amicus Curiae.
- **2 Jan 2026**
KUHP baru mulai berlaku.

TERPAPAR RADIOAKTIF, RI KEMBALIKAN 14 KONTAINER ASAL FILIPINA

Temuan-temuan baru muncul usai isu udang mengandung radioaktif produksi Indonesia di-recall Amerika Serikat (AS). Terbaru, pemerintah RI mengungkap sebanyak 14 kontainer impor asal Filipina terpapar radioaktif. Mengejutkannya, barang-barang tersebut tidak mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sebanyak 9 dari 14 kontainer impor asal Filipina terdeteksi terpapar zat radioaktif cesium-137 (Cs-137). Meski begitu, total seluruh 14 kontainer impor tersebut direeksport ke Filipina. "Ini yang akan segera kita kirim kembali," kata Zulkifli dikutip Minggu (14/9/2025).

Zulhas, begitu ia disapa, mengatakan paparan radioaktif dari kontainer yang berisi serbuk logam atau scrap tersebut diketahui usai melakukan pengecekan. Selain terdeteksi paparan radioaktif, Zulhas mengatakan impor produk itu tidak mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan akan meninjau ulang dan memperketat regulasi terutama pada barang-barang yang mengandung limbah terutama scrap.

Zulhas mengatakan temuan paparan ini diketahui tak lama sejak mencuatnya kasus udang beku Indonesia yang dilaporkan NFA Amerika Serikat karena terpapar Cs-137.

"Indonesia ini sebetulnya menjadi korban. Korban karena di saat bersamaan, pemerintah kita menemukan kontainer (terpapar radioaktif)," tutur dia.

Hingga saat ini Zulhas menyatakan sudah dua kali menggelar rapat koordinasi dengan instansi yang bersangkutan ihwal kasus udang impor yang terkontaminasi. Zulhas juga membentuk satuan tugas untuk penanganan kasus udang beku ekspor olahan PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

Zulhas mengatakan udang itu diduga terkontaminasi akibat aktivitas produksi PT PMT di kawasan industri Cikande, Banten. Pemerintah juga telah melokalisasi PT PMT dan akan segera melakukan dekontaminasi wilayah terdampak.

Pemerintah, kata Zulhas, melakukan investigasi secara hati-hati dengan pendekatan ilmiah sesuai standar internasional dan keamanan pangan. Ia pun meminta negara tujuan ekspor agar tidak khawatir atas kasus udang ini. "Keamanan pangan menjadi prioritas utama kita, pemerintah bergerak cepat," tutur dia.

Investigasi terhadap kontaminasi radioaktif pada udang beku ekspor olahan BMS Foods mengarah ke pabrik pengolahan logam bekas. Fasilitas



Penyegekan kawasan mengandung radioaktif cesium-137 oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup di sebuah pabrik di Cikande, Kabupaten Serang, Kamis (11/9/2025). (KLH)

BMS Foods dan pabrik pengolahan logam bekas itu berada di dalam di kawasan industri yang sama di Cikande, Serang, Banten.

Sempat Disegel

Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rizal Irawan

mengungkap investigasi awal memastikan bahan baku udang BMS Foods yang diekspor ke Amerika Serikat itu aman. Investigasi melibatkan pula Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta Kepolisian.

Di fasilitas BMS Foods, tim gabungan mendeteksi unsur

radioaktif yang dimaksud, Cesium-137, di bagian blower dan ventilator. Sekalipun konsentrasinya rendah dan jauh di bawah ambang batas, temuan itu telah langsung ditindaklanjuti dengan dekontaminasi seluruh area pabrik.

Pelacakan lanjutan kemudian membawa tim ke tingkat radiasi yang lebih tinggi. Lokasi pertama, di sebuah area tumpukan besi bekas di gubug kosong, di luar area pabrik BMS Foods. Lokasi kedua yang didatangi tim adalah pabrik PT Peter Metal Technology (PMT) di kawasan industri yang sama, saat radius pelacakan diperluas lagi hingga dua kilometer dari BMS Foods.

Pabrik PMT diduga memiliki keterkaitan dengan potensi sumber kontaminasi. Tingkat radiasi yang ditemukan di lokasi ini berada pada kisaran 0,3–0,5 mikrosievert per jam, lebih tinggi dari kondisi normal 0,1 mikrosievert per jam. (wid,rls,ant/dya)

Kontaminasi Bukan di Tambak, Udang Lebak-Pandeglang Aman Dikonsumsi

PENGUSAHA tambak udang asal Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, H Usmar Buntara memastikan udang dari wilayah Lebak dan Pandeglang aman dikonsumsi.

Usmar menegaskan dugaan kontaminasi radioaktif bukan berasal dari aktivitas PT Bahari Makmur Sejati (BMS), melainkan imbas dari pengolahan baja di sekitar kawasan industri PT Peter Metal Technology (PM) Kecamatan Cikande, Modern, Kabupaten Serang, Banten.

"Radioaktif itu murni imbas dari pengolahan baja sekitar pabrik. Tidak terbukti bahwa di BMS ada radioaktif. Secara internal, BMS murni tidak ada," kata Usmar, kepada wartawan saat dikonfirmasi, Minggu (14/9/2025).

Usmar mengungkapkan, pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan melakukan penyelidikan dan melokalisasi pabrik PT Peter Metal Technology (PMT) di kawasan

Cikande Modern yang diduga menjadi sumber kontaminasi radioaktif terhadap udang beku ekspor olahan PT BMS pada Jumat (12/9/2025).

"Kemarin kan sudah ada tuh pemberitaan kalau PT PMT sudah dilokalisasi sama pak menteri," ujarnya.

Usmar juga menjelaskan tambak udang yang dikelolanya menggunakan bahan alami dan tidak memakai bahan kimia seperti antibiotik, pengawet, maupun pewarna.

"Udang kita aman untuk dikonsumsi. Tidak ada bahan kimia. Radioaktif terkonfirmasi berasal dari pengelolaan limbah baja di luar BMS," jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat melobi Amerika Serikat agar ekspor udang kembali lancar sehingga tidak menimbulkan dampak luas bagi para petambak. "Kalau ekspor terhenti, dampaknya sangat besar. Bisa menimbulkan pengangguran dan kerugian berantai bagi masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, penolakan ekspor udang beku Indonesia oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat menimbulkan keresahan luas di kalangan petambak. Kasus yang menyeret nama PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) ini dinilai bisa berdampak serius pada nasib ribuan pekerja dan petambak kecil di Lebak dan Pandeglang.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (AP5I), Budhi Wibowo, menegaskan kasus udang terpapar isotop radioaktif yang mencuat di Amerika Serikat harus segera ditangani secara serius agar tidak meluas ke komoditas perikanan lain.

"Sejauh ini yang terdampak langsung memang hanya udang, tetapi kami khawatir bila isu ini tidak segera dilokalisir bisa merembet ke komoditas perikanan lain," kata Budhi kepada Kontan, Minggu (14/9/2025).

Menurut Budhi, sejumlah pembeli internasional mulai menunjukkan keraguan terhadap produk udang asal Indonesia. (wud,rls,ant/dya)

WASPADA! CUACA EKSTREM HINGGA 18 SEPTEMBER

Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan dilanda cuaca ekstrem hingga 18 September 2025. Fenomena ini dipicu oleh beberapa dinamika atmosfer.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia selama sepekan ke depan.

Beberapa dinamika menjadi pemicunya. Mulai dari nilai Dipole Mode Index (DMI) negatif, aktivitas gelombang Rossby Ekuator, gelombang Kelvin dan Madden Julian Oscillation (MJO). Lalu, Bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Sumatera dan Pola siklonik di sekitar Kalimantan Utara.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, terdapat 17 wilayah yang berpotensi turun hujan lebat periode 12-14 September.

Sedangkan cuaca ekstrem angin kencang diprediksi melanda Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Maluku.

"Hujan lebat: Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat," kata Guswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/9/2025).

"Selanjutnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan," sambungnya.

Sementara periode 15-18 September, hujan lebat diprediksi turun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Sedangkan angin kencang diprakirakan melanda Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan pada 12-14 September, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Timur, Utara dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Barat, Maluku, serta Papua Tengah dan Selatan. Angin kencang berpeluang melanda Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Sementara pada 15-18 September,

hujan lebat diperkirakan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Selatan, Papua Tengah, Pegunungan, serta Selatan. Potensi angin kencang masih mengintai Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Banjir dan longsor di Bali pada 9-10 September lalu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terparah dalam sepuluh tahun terakhir. Data BNPB mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.

Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah dengan 81 titik banjir, diikuti Gianyar (14 titik), Badung (12), Tabanan (8), Karangasem dan Jembrana (masing-masing 4), serta Klungkung (1 titik).

BMKG mencatat curah hujan ekstrem yang menjadi pemicu utama, dengan



Kondisi bangunan ruko yang hancur diterjang banjir terlihat di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Rabu (10/9/2025). Ant

Jembrana mencapai 385,5 mm per hari, Tampak Siring 373,8 mm, Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm. Beberapa wilayah lain mencatat curah hujan di atas 200 mm, jauh melampaui kategori ekstrem yakni 150 mm per hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menetapkan status siaga di 38 kabupaten/kota untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda wilayah tersebut.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Jatim, Sriyono, menjelaskan keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut atas peringatan dari BMKG Juanda yang memprediksi cuaca ekstrem akan melanda sedikitnya 22 daerah di Jatim.

"Karena ramalan bisa berubah, kami memperluas kesiapsiagaan hingga 38 kabupaten/kota. Semua

kepala BPBD daerah sudah kami instruksikan untuk siaga," ujar Sriyono, Sabtu (13/9).

BPBD Jatim memastikan seluruh perlengkapan dan logistik sudah didistribusikan ke daerah, mulai dari tenda, perahu karet, hingga kebutuhan pangan darurat. Petugas BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga disiagakan 24 jam penuh. (wid,rls,ist/dya)

Prediksi Cuaca Ekstrem BMKG (12-18 September 2025)

- 12-14 SEPTEMBER
Riau, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Kep. Riau, Sulawesi Selatan, Maluku
- 15-18 SEPTEMBER
Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan

Wilayah Rawan Bencana Jatim

- Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Malang, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, Trenggalek



Sumber:
BPBD
Jatim

Bulog Jamin Tak Ada Kelangkaan Beras SPHP dan Premium

SALAH satu yang menjadi kekhawatiran saat cuaca ekstrem adalah ketahanan pangan. Perum Bulog memastikan tidak ada kelangkaan beras, baik untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras premium di toko ritel modern, dalam kondisi aman.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Bulog bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di Alfamart, Indomaret, dan Grand Lucky di kawasan Radio Dalam, Jakarta, Minggu (15/8/9/2025), Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa penyaluran beras SPHP berjalan dengan lancar dan stok yang selalu terjaga.

"Jadi kami dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras, baik SPHP maupun beras premium ke ritel-ritel yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maupun di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, NTT, termasuk juga yang ada di Maluku

maupun yang ada di Papua," kata Rizal.

Ia menyampaikan beras-beras tersebut, khususnya SPHP dijual dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, yakni Rp62.500 per 5 kilogram.

Untuk beras premium, seperti Punokawan, Befood Setra Ramos, serta SLVP Super terpantau dijual dengan harga Rp74.500 per 5 kilogram atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Tak hanya itu, beras produksi swasta seperti Topi Hoki, Anak Raja, Hok-1, dan lainnya juga terpantau tersedia di ritel-ritel modern.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong sepenuhnya untuk penyaluran beras ke seluruh ritel-ritel modern, maupun nanti ke pasar-pasar. Supaya isu terkait dengan kelangkaan beras bisa dijawab dengan apa yang ada sekarang saat ini," ujarnya pula.

Rizal menyebut saat ini penyaluran beras SPHP telah mencapai 400 ribu ton, baik yang

masuk ke pasar tradisional ataupun ritel modern.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan Bulog akan terus melakukan peninjauan ke gudang, pasar, dan juga toko ritel untuk memastikan masyarakat mendapatkan beras sesuai kebutuhan.

Bulog juga memastikan bahwa ketersediaan beras SPHP telah sesuai standar dengan tetap menjaga kualitas dan daya saingnya di pasar. (wid,rls,ist/dya)

REALISASIKAN SEPATU GRATIS PELAJAR, DIKBUD KOTA MALANG BUTUH DANA RP 3 MILIAR

MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang berencana menambah item sepatu dalam paket seragam gratis di tahun depan. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyebut pengadaan sepatu diperkirakan membutuhkan anggaran tambahan hingga Rp3 miliar.

"Ya, sepatu itu kan macam-macam ya, dari segi mutu dan sebagainya. Jadi paling sekitar di antara Rp2 sampai Rp3 miliar. Kalau memang itu bisa dan dananya dari APBD mencukupi, ya bagus," ujar Suwarjana, dikutip pada Minggu (14/9/2025).

Suwarjana mengaku, wacana penambahan item sepatu ini muncul karena masih banyak orang tua siswa yang mengeluhkan sulit membeli sepatu hitam sesuai aturan sekolah.

Sebagian orang tua, menurutnya, juga menyebut harga sepatu yang tidak murah menjadi salah satu faktor yang menambah beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

"Iya, jadi wacana ini muncul karena ternyata masih banyak masyarakat kita yang kesulitan membeli sepatu hitam sesuai aturan sekolah, terlebih dengan harga yang semakin mahal," katanya.

Meski demikian, Suwarjana menegaskan pengadaan sepatu dalam program seragam gratis belum bisa direalisasikan pada tahun 2025 ini. Hal ini karena alokasi anggaran di Disdikbud Kota Malang pada tahun tersebut sudah terplot untuk program yang berjalan.

Namun Suwarjana memastikan, pihaknya tetap akan melakukan pengajuan anggaran di APBD 2026. Perhitungan kebutuhan dana akan dilakukan baik melalui internal Pemkot Malang maupun bersama DPRD Kota Malang.

"Pengajuannya tetap kami lakukan. Tetap kami hitung-hitung estimasinya butuh berapa, baik melalui perhitungan internal Pemkot maupun sinergi bersama DPRD Kota Malang. Nanti kami ajukan," jelasnya.

Sementara itu diketahui, untuk tahun ajaran 2025/2026, Pemkot Malang telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk program seragam gratis. Program ini menasar 16.500 siswa baru SD dan SMP negeri, terdiri dari 7.500 siswa kelas 1 SD negeri dan 9.000 siswa kelas 1 SMP negeri.

Meskipun seragam gratis pada tahun 2025 ini difokuskan untuk siswa

baru di sekolah negeri. Namun, sekolah swasta juga diberikan peluang untuk mengajukan bantuan jika ada siswa yang dinilai tidak mampu membeli seragam baru.

Dalam hal ini, Suwarjana menyebut mulai tahun 2026 mendatang, pelaksanaan program seragam gratis akan diperluas dengan menyertakan siswa baru di sekolah swasta.

"Memang sekolah swasta pun juga butuh. Jadi di 2026 nanti formulasi kami akan mengikutkan swasta untuk gratis juga," kata Suwarjana.

Jika siswa baru sekolah swasta ikut serta dalam program seragam gratis, maka anggaran diperkirakan akan bertambah sekitar Rp2 miliar. "Nah kalau siswa baru di sekolah swasta juga diikuti dalam program seragam gratis, perkiraan saya untuk



(Ilustrasi) Siswa baru SD Negeri di Kota Malang terima seragam gratis tahun ajaran 2025/2026. (Santi/Lentera)

sementara, ya, kita nambah sekitar Rp2 miliar. Jadi total sekitar Rp8 miliar," tambahnya.

Suwarjana juga memastikan, jenis seragam yang dibagikan masih akan sama seperti tahun sebelumnya, yakni dalam bentuk kain satu stel seragam merah putih, biru putih, dan pramuka. (Santi/Dya)

KABUPATEN MALANG AKUI

PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI BELUM 100%



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki. (dok. Prokopim Kab Malang)

pendataan DTSEN harus mencapai 100 persen karena data tersebut menjadi acuan nasional.

"Iya, harus 100 persen. Karena kemarin yang belum masuk DTSEN itu mereka yang terjadi mutasi misalnya, kemudian belum selesai p e n g u r u s a n a d m i n d u k n y a," ujarnya, dikutip pada Minggu (14/9/2025).

Pantja mencontohkan kasus perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Malang. Ketika data sudah tidak tercatat di daerah asal, namun administrasi kependudukan di tempat baru belum selesai, maka nama penduduk tersebut belum dapat masuk ke DTSEN Kabupaten Malang.

Menurutnya, percepatan pencapaian 100 persen sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. "Kalau

yang kesadarannya tinggi kan pasti segera mengurus kependudukannya," kata Pantja.

Meski demikian, menurutnya data dalam DTSEN tidak bersifat statis. Pantja menegaskan, pembaruan data dilakukan secara terus menerus untuk menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

"Kalau dalam praktiknya antara data di DTSEN dengan kenyataan di lapangan tidak sama, maka bisa dilakukan penyesuaian, pengusulan, ataupun pembaharuan, dan perubahan," terangnya.

Pemutakhiran data dilakukan melalui operator desa dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Proses ini memungkinkan penyesuaian data setiap waktu. Misalnya ketika terjadi peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan domisili, atau ketika keluarga berhasil tergradasi dari kemiskinan.

Ditegaskannya, Pemkab Malang menargetkan agar seluruh penduduk dapat segera terintegrasi dalam

DTSEN, sehingga data sosial ekonomi yang tersedia benar-benar akurat. Serta menjadi acuan dalam penyaluran program bantuan maupun perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, Pantja menuturkan DTSEN kini menjadi basis data tunggal yang digunakan pemerintah, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika DTKS hanya memuat data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menurutnya, DTSEN mencakup seluruh penduduk dengan klasifikasi sosial ekonominya.

"Jadi yang masuk di DTSEN itu bukan hanya PPKS. Karena di DTSEN itu juga melihat bagaimana status sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang," jelasnya.

Melalui DTSEN, menurutnya, penduduk akan dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kelompok desil 1 hingga 5 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Di mana kelompok desil 1 juga akan menjadi prioritas dalam program Sekolah Rakyat (SR). (Santi/Dya)

Demo Merebak di Berbagai Negara CHAOS DI LONDON HINGGA AUSTRALIA

Setidaknya 72 orang tewas dan 191 lainnya dirawat akibat demo antikorupsi di Nepal, menurut data pemerintah Minggu (14/9/2025).

Aksi besar-besaran ini meletus sejak Jumat (5/9/2025) ketika generasi muda, khususnya Gen Z, memprotes pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Ketidakpuasan dipicu oleh gaya hidup mewah pejabat di tengah kondisi ekonomi sulit serta maraknya kasus korupsi, termasuk perjanjian pembelian pesawat Airbus tahun 2017.

Amarah massa kemudian berujung pada penyerbuan dan pembakaran sejumlah gedung penting, mulai dari parlemen, Mahkamah Agung, kantor polisi, hingga kediaman pejabat tinggi negara.

PRANCIS

Sementara itu, di benua Eropa Barat, gelombang protes besar juga mewarnai Prancis. Pada Rabu (10/9/2025) kemarin, gelombang aksi besar-besaran meledak di Ibu Kota Paris Prancis dengan identitas gerakan "Block Everything". Ribuan massa yang memadati pusat kota melakukan pemblokiran jalan.

Dikutip dari CBC News, massa mengamuk melakukan barikade jalan dan terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Protes mereka merupakan bentuk kemarahan terhadap Presiden Emmanuel Macron dan elit politik akibat kebijakan pemangkasan belanja negara.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sekitar 200.000 orang turun ke jalan dalam gerakan "Block Everything" di Paris. Massa memblokir jalan dan membakar fasilitas, memicu bentrokan dengan polisi yang menembakkan gas air mata. Aksi ini menyebabkan hampir



Petugas polisi berhadapan dengan pendukung aktivis anti-imigrasi Inggris Stephen Yaxley-Lennon, yang juga dikenal sebagai Tommy Robinson, selama demonstrasi kelompok kampanye Stand Up to Racism, di London, Inggris, Sabtu (13/9/2025). (Foto: Reuters)

200 orang ditangkap dan membuat ibu kota nyaris lumpuh.

Gerakan "Block Everything" menimbulkan gangguan besar hingga 80.000 polisi dikerahkan. Sebuah bus dibakar di Rennes dan kerusakan kabel listrik membuat jalur kereta barat daya lumpuh. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menuding massa sengaja menciptakan suasana memberontakan untuk melawan kepemimpinan Macron.

JERMAN

Pada hari yang sama Sabtu (13/9/2025), di kawasan Eropa Tengah, Berlin turut menjadi pusat gelombang protes. Massa aksi menentang keterlibatan Jerman dalam konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Para pengunjung rasa mendesak pemerintah menempuh jalur diplomasi dan menghindari perang atau pengiriman senjata.

Protes yang digerakkan Partai Sahra Wagenknecht Alliance - Reason and Justice (BSW) menolak kebijakan Jerman terkait Ukraina dan konflik Timur Tengah. Ribuan massa membawa bendera Palestina, Rusia-Jerman, serta spanduk menuntut dihentikannya pembunuhan warga sipil di Gaza.

Salah satu pendiri partai, Sahra Wagenknecht, dan sejumlah tokoh budaya Jerman turut serta dalam demonstrasi tersebut. Slogan aksi tersebut adalah "Hentikan genosida di Gaza! Tidak ada senjata di zona perang! Perdamaian, bukan perlombaan senjata!"

Beberapa orator di Gerbang Brandenburg, sejarawan Israel Moshe Zuckerman dan musisi Roger Waters menyuarakan kritik terhadap militer Israel. Penyelenggara aksi mendesak pemerintah Jerman menghentikan pengiriman senjata, menolak wajib militer, serta menentang penempatan rudal AS, sambil mendorong negosiasi perdamaian yang serius.

AUSTRALIA

Tak hanya Eropa, gejolak protes juga merebak hingga ke Australia dengan isu yang beragam. Sedikitnya empat unjuk rasa besar berlangsung di berbagai kota Australia pada Sabtu (13/9/2025). Demonstrasi menyuarakan beragam isu, mulai dari antikorupsi, anti-rasisme, hak penduduk pribumi, hingga perjuangan Palestina.

Seperti dilansir dari laporan ABC News, polisi negara bagian New South Wales menahan seorang pria karena mengganggu ketertiban dan memberi peringatan kepada individu lain yang menerbangkan drone di atas kerumunan demonstrasi.

Di Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, sebanyak 150 polisi memisahkan dua kelompok unjuk rasa yang saling berseberangan, yakni pendukung politik sayap kanan dan peserta Pawai Kedaulatan Pribumi, yang digelar di depan Gedung Parlemen.

Sementara itu, ribuan orang mengikuti unjuk rasa bertajuk Australia Bersatu Melawan Korupsi Pemerintah di Sydney, ibu kota New

South Wales sekaligus kota terbesar di Australia.

Di Brisbane, Queensland, sekitar 500 orang menggelar aksi menolak rasisme dan diskriminasi. Beberapa di antaranya menyuarakan slogan pro-Palestina seperti "Dari sungai ke laut, Palestina pasti merdeka".

Aksi serupa juga terjadi di Hobart, Tasmania, di mana 300 orang berunjuk rasa mendukung hak kaum pribumi sambil mengibarkan bendera Aborigin Australia dan membentangkan spanduk protes.

Di Adelaide, South Australia, ratusan orang turun ke jalan memprotes rasisme. Pada saat yang sama, kelompok demonstrasi yang lebih besar berunjuk rasa menolak praktik korupsi.

Rangkaian unjuk rasa tersebut terjadi usai serangan terhadap kemah protes pro-hak pribumi Camp Sovereignty di Melbourne pada 31 Agustus lalu. Dalam insiden itu, lebih dari 40 pria berpakaian hitam menyerang lokasi kemah usai berlangsungnya unjuk rasa antiimigrasi bertajuk March for Australia.

LONDON

Kerusuhan yang meluas ini kemudian berlanjut kembali ke Inggris, dengan pecahnya aksi besar di London. Demo anti-imigran yang diorganisir oleh aktivis Tommy Robinson atau Stephen Yaxley-Lennon di London, Inggris, berujung ricuh pada Sabtu (13/9/2025) waktu setempat. Sebanyak 25 orang ditangkap.

Sekitar 150 ribu orang ikut demo sayap kanan dengan membawa bendera Union Jack, sementara 5 ribu orang menghadiri demo tandingan "Stand Up to Racism". Keriuhan pecah saat massa mencoba masuk ke area steril dekat kelompok tandingan.

"Tidak diragukan lagi banyak yang datang untuk menggunakan hak mereka yang sah untuk berunjuk rasa, tetapi banyak juga yang berniat melakukan kekerasan," kata Asisten Komisaris Matt Twist dikutip dari AFP, Minggu (14/9/2025).

"Mereka menghadapi petugas, melakukan kekerasan fisik dan verbal, dan berupaya keras menerobos barikade yang ada demi menjaga keamanan semua orang," tambahnya.

Sementara itu, dalam keriuhan itu, 26 polisi terluka—empat di antaranya parah—sementara 25 orang ditangkap atas berbagai tuduhan. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengutuk aksi tersebut dan berjanji menghukum para pelaku. CBC News, AFP, AP, Reuters, CNN, ist/nei)



Para pengunjung rasa berhasil menghentikan pusat kota, tetapi polisi mengatakan tidak ada kekhawatiran serius. (Foto: AAP)

Ini Penyebab Indonesia Catat Kualitas Tidur Terburuk di Asia

Indonesia dinilai memiliki kualitas sekaligus durasi tidur paling rendah di Asia. Menurut Dokter Spesialis Kesehatan Tidur, dr. Andreas Prasadja, peringkat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain.

“Untuk Asia, Indonesia paling buruk. Beberapa penelitian mencatat durasi tidur rata-rata orang Indonesia 6 jam 36 menit. Ada juga yang menyebutkan 6 jam 39 menit. Sementara rata-rata Asia 7 jam, Australia 8 jam, dan Eropa 8 jam,” kata Andreas di sela acara World Sleep Congress 2025 di Singapura, Jumat (12/9/2025).

Sebuah riset konsumen dari Samsung di kawasan Asia Tenggara dan Oseania (SEAO) menunjukkan adanya tantangan besar terkait kualitas tidur dan kesehatan. Hasil penelitian itu mencatat, orang dewasa di wilayah SEAO, termasuk Indonesia, rata-rata hanya tidur sekitar 6 jam 50 menit per malam, lebih sedikit dibandingkan rekomendasi National Sleep Foundation yang menyarankan 7 hingga 9 jam.

Riset lebih lanjut juga menemukan, 28% responden mengaku kesulitan untuk “benar-benar bisa rileks atau berhenti berpikir”, yang menjadi kendala utama dalam memperoleh kualitas tidur. VP Mobile eXperience Business Samsung Electronics SEAO, Carl Nordenberg, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil riset tersebut, sebagian besar masyarakat di kawasan ini menempatkan tidur sebagai

prioritas ketiga setelah keuangan dan keluarga. “Hasilnya menunjukkan bahwa kesehatan menempati prioritas tinggi di kawasan ini, di mana responden menempatkannya di urutan ketiga setelah keuangan dan keluarga,” ujar Carl dalam keterangan tertulis. Bahkan menurut data World Population Review, Indonesia berada di peringkat 44 dari 51 negara di dunia terkait rata-rata durasi tidurnya.

Penyebab

Menurut Andreas, penyebab buruknya kualitas tidur masyarakat Indonesia beragam, mulai dari faktor infrastruktur hingga gaya hidup. Ia mencontohkan kondisi lalu lintas di Jakarta yang macet, sehingga masyarakat harus bangun lebih awal untuk berangkat kerja atau sekolah. Berbeda dengan Singapura, di mana warga dapat bangun lebih siang karena transportasi publik lebih efisien dan waktu perjalanan lebih singkat serta dapat diprediksi.

Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan perangkat digital juga memperburuk kualitas tidur. Andreas menyarankan agar penggunaan gawai sebelum tidur dikurangi. Kebiasaan mengonsumsi camilan dan kafein di malam hari juga perlu dibatasi demi mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. “Kualitas tidur buruk yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko penyakit serius serta menambah tingkat stres. Begitu tidurnya tidak sehat, tubuh

akan stres. Zat-zat oksidan dalam tubuh naik, dan ini bisa meningkatkan risiko stroke serta penyakit jantung,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tidur harus ditempatkan sejajar dengan nutrisi dan olahraga sebagai pilar utama kesehatan. “Kalau olahraga dan nutrisi sudah baik, tetapi tidur berantakan, semuanya akan sia-sia. Apabila Anda mengalami gejala gangguan tidur, lakukan cara meningkatkan kualitas tidur atau praktik sleep hygiene berikut ini:

Buat Rutinitas Sebelum Tidur

Jika terbiasa menggunakan ponsel sebelum tidur, sebaiknya mulai mengurangi kebiasaan tersebut. Paparan cahaya biru dari layar perangkat elektronik dapat menekan produksi hormon melatonin, sehingga tubuh tetap terjaga dan akhirnya menimbulkan gangguan tidur. Sebagai gantinya, biasakan diri dengan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur. Pilih aktivitas yang membantu relaksasi, seperti mandi air hangat, menulis jurnal, atau membaca buku.

Ciptakan Kamar Tidur yang Nyaman

Lingkungan tidur yang nyaman dapat membantu seseorang beristirahat lebih nyenyak. Matikan lampu atau gunakan pencahayaan redup dari lampu tidur saat beristirahat. Hindari suhu kamar yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Jika kondisi sekitar terlalu bising,

penyumbat telinga bisa menjadi solusi.

Selain itu, batasi aktivitas di dalam kamar tidur. Usahakan kamar tidur hanya difungsikan untuk beristirahat, sehingga terbentuk pola pikir bahwa kamar adalah tempat khusus untuk tidur.

Buat Pola Tidur yang Teratur

Untuk meningkatkan kualitas tidur, hindarilah memulai aktivitas yang dapat membuat Anda terjaga hingga larut malam. Usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari serta penuhi kebutuhan tidur yang cukup. Rutinitas ini akan membantu otak membentuk pola tidur yang lebih konsisten. Atur jadwal tidur secara bertahap agar tubuh lebih mudah menyesuaikan diri. Jika ingin tidur siang, batasi durasinya tidak lebih dari 20 menit dan lakukan sebelum sore hari.

Perhatikan Pola Makan

Biasakan mengonsumsi makanan sehat setiap hari dan kurangi asupan berlemak agar tubuh tetap bugar serta kualitas tidur lebih baik. Hindari makan berat menjelang waktu tidur maupun minum minuman berkafein pada sore hari karena dapat mengganggu proses tidur. Sebagai alternatif, Anda bisa memilih camilan ringan seperti kacang-kacangan atau biji-bijian dalam porsi secukupnya untuk mengurangi rasa lapar di malam hari. (nei,ist/dya)

LISENSI MUSIK AI PERTAMA HADIR DARI SWEDIA

Organisasi yang menaungi para pelaku industri musik di Swedia, STIM, bekerja sama dengan perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meluncurkan perjanjian lisensi terkait musik yang dihasilkan oleh AI.

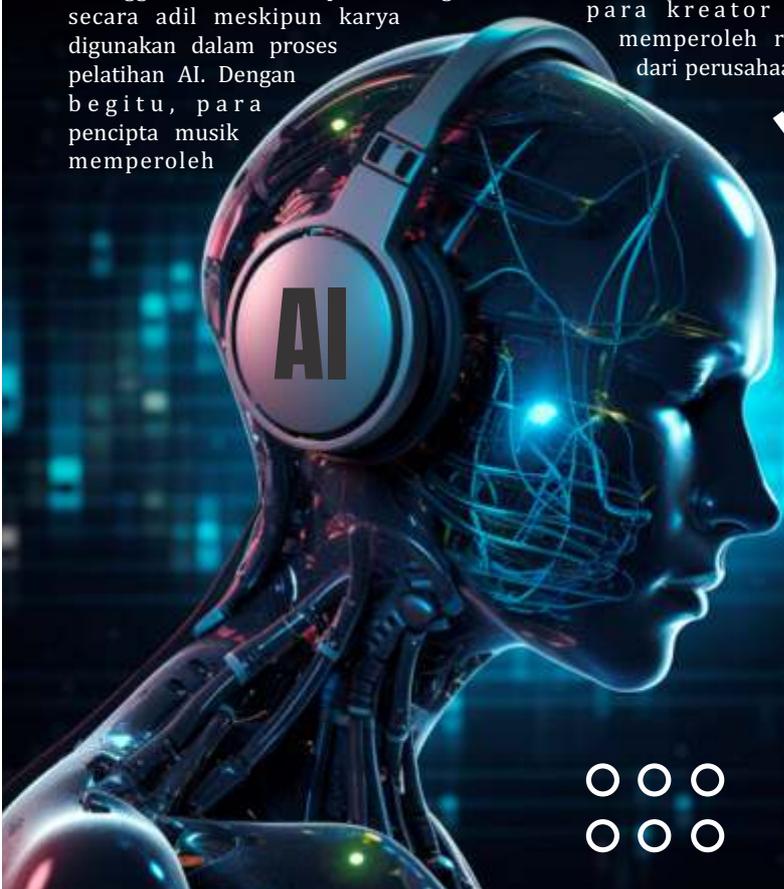
Dikutip dari The News pada Jumat (12/9/2025), lisensi musik AI ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan AI untuk memanfaatkan lagu-lagu berhak cipta sebagai materi dalam melatih model kecerdasan buatan mereka.

Lisensi ini turut memastikan adanya kompensasi yang layak bagi para komposer dan penulis lagu, sehingga hak mereka tetap terlindungi secara adil meskipun karya digunakan dalam proses pelatihan AI. Dengan begitu, para pencipta musik memperoleh

penghargaan yang setimpal atas kontribusi kreatif mereka.

Langkah tersebut diambil oleh STIM sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan AI generatif di berbagai sektor industri kreatif. Fenomena ini kerap menimbulkan pelanggaran terhadap integritas artistik para seniman, termasuk mereka yang bergerak di industri musik, sehingga diperlukan regulasi yang dapat menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta.

Lisensi musik AI yang digagas STIM mencakup lebih dari 10.000 komposer, penulis lagu, serta penerbit musik. Melalui perjanjian tersebut, para kreator berhak memperoleh royalti dari perusahaan



teknologi yang menggunakan karya mereka sebagai bahan pelatihan model kecerdasan buatan. Hal ini menjadi langkah konkret untuk memastikan perlindungan sekaligus penghargaan terhadap karya musik berhak cipta.

Pelaksana Tugas CEO STIM, Lina Heyman, menegaskan bahwa lisensi ini tidak hanya berfokus pada kepentingan komersial. Lebih dari itu, perjanjian ini juga menjadi panduan dalam memberikan kompensasi yang adil bagi musisi serta jaminan hukum yang jelas bagi perusahaan AI yang memanfaatkan musik berlisensi.

Dengan adanya lisensi ini, STIM berharap tercipta keseimbangan antara perkembangan teknologi dan keberlangsungan industri musik. Inisiatif tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi negara maupun organisasi lain dalam mengatur pemanfaatan karya seni

di era kecerdasan buatan, sehingga hak-hak para seniman tetap terlindungi di tengah pesatnya inovasi digital.

"Kami ingin menunjukkan bahwa merangkul disrupsi tanpa mengorbankan kreativitas manusia adalah hal yang mungkin," kata Lina.

Konfederasi Internasional Masyarakat Penulis dan Komposer (CISAC) menyoroti ancaman kecerdasan buatan terhadap keberlangsungan hidup para seniman. Berdasarkan proyeksi, penggunaan AI berpotensi menurunkan pendapatan penulis lagu hingga 24 persen pada tahun 2028, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang lebih serius bagi para kreator.

Kehadiran regulasi seperti lisensi musik AI diharapkan mampu menjadi solusi untuk mendukung hak-hak seniman di tengah era AI generatif. Aturan ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memastikan integritas karya seni tetap dihargai di tengah pesatnya perkembangan teknologi. (nei,ist/dya)



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pilihan Parfum yang Buat Penampilan Dewasa

Parfum merupakan salah satu cara termudah untuk mengekspresikan diri. Wewangian yang dikenakan mampu meninggalkan kesan mendalam, bahkan menjadi identitas yang mudah diingat oleh orang lain. Oleh sebab itu, memilih parfum tidak sekadar soal aroma yang menyenangkan, tetapi juga bagaimana wangi tersebut mencerminkan kepribadian serta gaya hidup pemakainya.

Jika parfum floral segar identik dengan keceriaan, maka aroma parfum dewasa menghadirkan sisi yang berbeda yaitu anggun, elegan, dan penuh kehangatan. Wewangian jenis ini sering dianggap timeless karena tetap relevan meskipun tren parfum terus berganti.

Bagi sebagian orang, aroma parfum dengan karakter dewasa sering dianggap sebagai simbol kedewasaan sekaligus kepercayaan diri. Tidak mengherankan bila wewangian klasik tetap menjadi bagian dari koleksi merek-merek ternama hingga saat ini. Menurut ElizabethKosich Styling, parfum merupakan elemen penting dalam personal branding, dan pilihan aroma dewasa menjadi salah satu kunci untuk tampil elegan serta meninggalkan kesan yang kuat.

Carnation (Anyelir)

Aroma anyelir dikenal memiliki karakter pedas-floral yang khas, menghadirkan perpaduan wangi yang

unik sekaligus berani. Tidak seperti bunga pada umumnya yang cenderung manis atau lembut, anyelir justru memberikan nuansa yang lebih tegas dan intens. Inilah yang membuatnya sering dijadikan pilihan bagi mereka yang ingin menghadirkan kesan kuat dalam sebuah parfum.

Salah satu parfum legendaris yang menggunakan note carnation adalah Poison dari Dior. Kehadiran anyelir di dalamnya memberi lapisan aroma misterius yang berpadu dengan wangi lainnya, menciptakan aura yang memikat sekaligus penuh karakter. Keharumannya tidak hanya meninggalkan kesan elegan, tetapi juga menghadirkan sisi bold yang berbeda dari parfum floral biasa.

Karena karakternya yang unik, parfum dengan aroma anyelir sangat cocok untuk kamu yang ingin tampil menonjol dan berbeda dari keramaian. Kehangatan sekaligus ketegasan dari wangi pedas-floral ini mampu meningkatkan rasa percaya diri, terutama dalam momen-momen spesial.

Rose (Mawar)

Aroma mawar selalu identik dengan keanggunan dan keabadian, menjadikannya salah satu wangi bunga yang paling populer dalam dunia parfum. Keharumannya yang lembut mampu menghadirkan nuansa romantis sekaligus menenangkan, sehingga sering dianggap sebagai simbol cinta dan

keindahan. Tak heran, mawar menjadi pilihan utama dalam berbagai kreasi parfum dari masa ke masa.

Varian rose powdery menawarkan sentuhan klasik yang anggun dan mewah. Wangi ini biasanya mengingatkan pada parfum-parfum lama yang elegan, memberi kesan hangat dan timeless. Cocok digunakan pada acara-acara formal atau saat ingin menghadirkan aura sophisticated yang penuh karakter.

Woody Scents (Kayu-kayuan)

Nuansa woody dari bahan-bahan seperti sandalwood, cedarwood, atau oak moss menghadirkan aroma hangat yang khas sekaligus memancarkan kesan natural dan menenangkan. Karakter aromanya sering kali dikaitkan dengan kedewasaan dan kekuatan, sehingga banyak digunakan sebagai fondasi utama dalam berbagai kreasi parfum klasik maupun modern.

Parfum dengan base woody biasanya memiliki lapisan aroma yang lebih dalam dan kompleks, membuatnya terasa elegan serta tahan lama di kulit. Keharumannya perlahan berkembang seiring waktu, memberikan pengalaman olfaktori yang kaya dan memikat. Tak heran, jenis parfum ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin meninggalkan jejak aroma yang kuat namun tetap refined. Karakter woody sangat cocok dipakai pada acara malam atau momen spesial, karena mampu menonjolkan sisi sophisticated pemakainya. Baik digunakan sebagai signature

scent maupun sebagai pelengkap koleksi parfum, wangi woody selalu berhasil memberikan sentuhan eksklusif dan memikat perhatian tanpa terkesan berlebihan.

Patchouli

Patchouli dikenal dengan aromanya yang earthy dan sensual, memberikan kesan alami yang kaya sekaligus memikat. Karakternya yang kuat sering membuatnya dijadikan salah satu bahan utama dalam dunia parfum sejak lama. Kehadiran patchouli mampu memberikan dimensi yang dalam, menjadikannya fondasi yang kokoh untuk melengkapi aroma floral, fruity, maupun spicy.

Selain memberi kesan berani dan bohemian, patchouli juga menghadirkan nuansa mewah yang membuat parfum terasa lebih eksklusif. Banyak desainer parfum menggunakan patchouli untuk menyeimbangkan aroma lain agar lebih tahan lama sekaligus meninggalkan jejak aroma khas yang sulit dilupakan. Sentuhan patchouli kerap dipilih oleh mereka yang ingin tampil beda, dengan aura yang penuh percaya diri.

Powdery Scents

Wangi powdery dari bunga seperti violet atau lilac identik dengan kelembutan dan sisi feminin yang anggun. Aromanya yang lembut, menenangkan, dan sedikit manis menghadirkan kesan elegan sekaligus intim, seolah memberikan pelukan hangat. Tak heran jika nuansa powdery sering dijadikan simbol keanggunan klasik yang abadi dan tak lekang waktu.

Contoh paling ikonik dari karakter ini adalah Chanel No.5, parfum legendaris yang menjadikan aroma powdery sebagai ciri khasnya. Keharumannya menciptakan aura sophisticated sekaligus timeless, membuatnya tetap dicintai lintas generasi. Sentuhan powdery mampu membangkitkan nuansa nostalgia sekaligus menghadirkan relevansi modern, sehingga cocok dipakai dalam berbagai kesempatan, baik formal maupun momen pribadi(nei,ist/dya)



Presiden Belum ...dari hal 1

Sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu langsung dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025) lalu. Pertemuan itu untuk menyampaikan aspirasi supaya presiden segera melakukan reformasi Polri.

Tokoh-tokoh yang hadir dalam rombongan GNB antara lain istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; teolog sekaligus filsuf Romo Franz Magnis-Suseno SJ; cendekiawan Muslim Prof. M. Quraish Shihab; dan kiai kharismatik KH Ahmad Mustofa Bisri.

Turut serta pula filsuf sekaligus astronom Karlina Rohima Supelli, Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty, mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Romo A. Setyo Wibowo SJ, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Laode Moh. Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, hingga budayawan Slamet Rahardjo.

Mereka menilai, reformasi ini mulai dari dalam struktur, budaya organisasi, maupun perilaku anggotanya, sehingga bisa kembali mendapat kepercayaan publik. Dan aspirasi tersebut mendapat sambutan baik dari Presiden Prabowo.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo, Kamis (11/9/2025) malam seperti dilansir Kompas.

Sementara itu, Allisa Wahid menekankan pentingnya pembenahan secara utuh institusi Polri agar kekerasan oleh aparat tidak terulang lagi. "Kami mengusulkan pembenahan utuh, terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksekutif yang dilakukan kepada rakyat" kata Allisa.

Tokoh GNB lainnya, Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo menyambut tuntutan mereka dengan janji soal supremasi sipil dan reformasi Polri. Terkait dengan langkah reformasi Polri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Kita serahkan kepada Presiden untuk secepatnya menempuh langkah-langkah konstruktif (soal reformasi Polri)," kata Lukman.

Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian menolak pendekatan setengah hati dalam Reformasi Polri. Dia menegaskan bahwa Reformasi Polri bukan sekadar

pembentukan komite atau forum dialog yang berhenti di atas kertas.

"Struktur, budaya, dan mental internal Polri harus dibenahi, dan ini butuh keberanian politik serta implementasi nyata, bukan sekadar wacana," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025) dilansir sindonews.

Aminullah menambahkan, setiap rekomendasi Reformasi Polri harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen. "Reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah," ujarnya.

Selain kritik keras, Aminullah juga menilai tuduhan bahwa institusi Kepolisian menjadi dalang di balik demo anarkis pada 25 - 31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.

"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," tegasnya.

Aminullah mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.

"Polri telah bekerja profesional, bukan untuk menekan rakyat, tetapi memastikan suara rakyat terdengar dalam kondisi aman," tambahnya.

Selain itu, Aminullah menduga ada upaya sejumlah pihak untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi Polri. Pihaknya menegaskan dukungannya terhadap reformasi Polri, dengan syarat langkah nyata segera diambil dan bukan sekadar wacana atau rekomendasi yang tersimpan di meja pejabat.

"Kami siap mengawal setiap langkah nyata, menolak wacana kosong, dan memastikan Polri tumbuh menjadi institusi profesional, berintegritas, dan benar-benar melayani masyarakat. Kami menolak tuduhan, asumsi dan narasi oleh para tokoh seolah olah Polri di balik semua kerusuhan pekan lalu," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan mendapat informasi yang menyatakan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri hingga 2025.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025. Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir dilansir tribunnw Minggu (14/9/2025).

Meski demikian dia berharap di akhir tahun nanti sudah ada Kapolri

baru. Sebab, dia pun menyebutkan isu pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah suatu hak yang biasa. "Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandasnya.

Di satu sisi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengirim surat presiden (surpres) ihwal pergantian jabatan Kapolri kepada DPR RI.

Dia menyebutkan diskursus yang berkembang sejauh ini ihwal pergantian Kapolri merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Belum ada surpres pergantian Kapolri ke DPR. Jadi, berkenaan dengan itu adalah tidak benar," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/9/2025) seperti dilansir tempo.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa Istana telah mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ke DPR RI. "Belum," kata Dasco saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Dasco kembali menegaskan bahwa hingga saat ini, pimpinan DPR RI belum menerima Surpres terkait pergantian Kapolri dari Presiden Prabowo Subianto. "Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri," tegasnya.

Kemudian, secara terpisah anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding mengatakan hal serupa. Dia menyebutkan, hingga saat ini, komisinya belum menerima surpres dari Prabowo ihwal pergantian Kapolri. "Sejauh ini belum ada soal itu," kata Sudding.

Adapun diskursus hingga desakan pergantian Kapolri berkembang setelah meluasnya eskalasi demonstrasi di penghujung Agustus hingga awal September lalu.

Desakan mengganti kapolri kian menguat saat kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri melindas seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan hingga tewas pada 28 Agustus 2025.

Dua hari setelahnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan persoalan pergantian jabatannya merupakan kewenangan Presiden. "Itu hak prerogatif Presiden," kata Listyo di Kopi Koneng, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Kendati begitu, Listyo melanjutkan, sebagai seorang prajurit, ia akan selalu siap menjalankan perintah dari Presiden, termasuk jika harus digantikan jabatannya.

Namun, kata dia, saat ini Presiden hanya memerintahkan Korps

Bhayangkara berfokus menjaga stabilitas keamanan nasional. Listyo adalah Kapolri yang menjabat sejak masa pemerintahan Joko Widodo pada 2021.

Seiring dengan desakan reformasi Polri dan pergantian Kapolri, muncul isu adanya dua nama calon Kapolri baru. Mereka adalah Komjen Suyudi Ario Seto, dan Komjen Dedi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Keduanya bukan sekadar perwira tinggi biasa, tetapi sosok dengan karier panjang, pengalaman strategis, serta laporan kekayaan yang mengundang perhatian masyarakat.

Komjen Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) 1994. Dia memulai kiprah kepemimpinannya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, lalu Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjarangan.

Komjen Suyudi juga berpengalaman atau spesialis di bidang reserse dengan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Kanit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.

Kemudian juga pernah menjadi Kapolres Majalengka tahun 2014. Setahun kemudian menjabat Kapolres Bogor, lalu menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat. Pada 2016, Komjen Suyudi kembali lagi ke Jawa Barat menjadi Kapolresta Bogor Kota. Tahun 2017, menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan lalu diangkat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Setelah dua tahun dipercaya menjabat Dirreskrim Polda Metro Jaya, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, ia dilantik menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol Abdul Karim yang dimutasi sebagai Kadiv Propam.

Sementara, Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. Dia menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990.

Ketika Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri. Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri.

Dedi mengawali karier profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaurbinopsnal Satreskrim) Polres Lamongan, Jawa Timur. Komjen Dedi juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya pada 2007. Kemudian menjadi Kapolres Kediri Kota pada 2008, 2009 sebagai Kapolres Lumajang. Kemudian, pada 2017 menjadi Wakapolda Kalimantan Tengah. (han,ist/lut)

142 NEGARA ANGGOTA PBB AKUI PALESTINA MERDEKA

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara mayoritas mendukung resolusi tidak mengikat yang mengadvokasi Solusi Dua Negara untuk Israel dan Palestina, Jumat (12/9/2025). Resolusi itu disepakati 142 negara dari total 193 negara anggota PBB ini mengakui Palestina sebagai negara merdeka.



Untuk pertama kali hari ini, PBB mengadopsi teks yang mengutuk Hamas atas kejahatannya dan menyerukan mereka menyerahkan diri dan melucuti senjatanya,"

Jean-Noel Barrot
Menteri Luar Negeri Prancis



Rapat Dewan Keamanan PBB membahas konflik di Jalur Gaza.

Resolusi ini didukung oleh semua negara Teluk Arab. Di satu sisi, Amerika Serikat (AS) dan Israel menentangnya, kemudian juga ada 8 negara lainnya yaitu Argentina, Hongaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Dan ada 12 negara lainnya memilih abstain.

Deklarasi yang disahkan oleh resolusi ini menyatakan bahwa perang di Gaza "harus diakhiri sekarang" dan mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Resolusi itu berisikan sejumlah poin usulan atas agresi Israel terhadap Gaza yang sudah berjalan nyaris dua tahun hingga krisis kemanusiaan di Palestina akibat serangan tersebut. Ada pula usulan agar pemerintahan di Palestina seluruhnya diserahkan kepada Otoritas Palestina, hingga pembentukan misi perlindungan sipil yang didukung PBB.

Deklarasi ini juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, blokade, dan kelaparan, "yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan perlindungan yang menghancurkan."

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan resolusi ini memastikan isolasi internasional terhadap Hamas.

"Untuk pertama kali hari ini, PBB mengadopsi teks yang mengutuk Hamas atas kejahatannya dan menyerukan mereka menyerahkan diri dan melucuti senjatanya," katanya dalam unggahan di X dilansir Bloomberg Minggu (14/9/2025).

Berikut isi resolusi Majelis Umum PBB mengenai pengakuan negara Palestina.

Dukung pengakuan negara Palestina

Resolusi ini mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka. Suara mayoritas Majelis Umum PBB juga memproyeksikan solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Hal itu sejalan dengan Deklarasi New York yang menetapkan peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara.

Kutuk serangan Hamas 7 Oktober 2023

Deklarasi itu juga mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas disebut harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza, membebaskan semua sandera, dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina.

"Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada

Otoritas Palestina," demikian bunyi deklarasi tersebut dilansir cnnindonesia.

Kecam krisis kemanusiaan di Gaza oleh Israel

Resolusi ini juga mengecam serangan Israel atas warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Tak hanya itu, resolusi juga mengecam pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan serta krisis perlindungan.

Kecaman itu muncul imbas operasi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Sebagian besar wilayah Gaza juga telah rata dengan tanah dan lebih dari 2 juta penduduknya telah mengungsi.

Usulkan Otoritas Palestina memerintah wilayah Palestina

Usulan lain dalam resolusi tersebut yakni Otoritas Palestina (PA) memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina. Hal itu harus dicapai dengan Hamas yang menyerahkan senjata dan kuasanya kepada PA.

Kemudian, usulan resolusi Majelis Umum PBB mengusulkan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.

Usulkan misi perlindungan warga sipil Palestina dengan didukung PBB

Selain itu, resolusi ini menyarankan penempatan misi yang didukung PBB untuk melindungi warga sipil Palestina dan memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel.

Resolusi juga mendukung transisi pemerintahan yang damai kepada PA, serta memantau gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan.

Akan tetapi, AS menuding pemungutan suara yang menghasilkan resolusi itu sebagai "aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu" yang merusak upaya diplomatik serius untuk mengakhiri konflik.

"Jangan salah, resolusi ini adalah hadiah bagi Hamas," ujar diplomat AS Morgan Ortogus pada Majelis Umum.

Dia juga menyuarakan bahwa tindakan tersebut "Jauh dari mempromosikan perdamaian, konferensi ini memperpanjang perang, membuat Hamas semakin berani, dan merusak prospek perdamaian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang."

Sementara itu, Israel, yang telah lama mengkritik PBB karena tidak mengutuk Hamas secara langsung atas serangan 7 Oktober, menganggap deklarasi ini sebagai tindakan sepihak dan menuduh pemungutan suara tersebut sebagai sandiwara belaka.

"Satu-satunya yang diuntungkan adalah Hamas. Ketika teroris yang bersorak, Anda tidak mempromosikan perdamaian; Anda justru mempromosikan teror," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. (han,ist/lut)